

KK
23/04
A. H.
2

**DAMPAK PENGIMPLEMENTASIAN PERJANJIAN
GATT/WTO TERHADAP PERUBAHAN STRUKTUR
EKSPOR INDONESIA PERIODE 1980 - 2000**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**



Diajukan Oleh

**SOFYAN TSAURI ANDI
No. Pokok : 049715817**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

SKRIPSI

**Dampak Pengimplementasian Perjanjian GATT/WTO
Terhadap Perubahan Struktur Ekspor Indonesia
Periode 1980-2000**

DIAJUKAN OLEH :
SOFYAN TSAURI ANDI
No. Pokok :049715817

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Dra. Ec. Eva Kusuma S., M.A., M.D.E.

TANGGAL. 23 - 03 - 2004

KETUA PROGRAM STUDI,



Dra. Ec. Hj. Sri Kusreni, Msi

TANGGAL. 23 - 03 - 2004

Surabaya, 08 - 12 - 2003

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Dra. Ec. EVA KUSUMA S., M.A., M.D.E.

ABSTRAKSI

Perdagangan di dunia dari tahun ke tahun mengalami perubahan pola menuju arah liberalisasi. Hal-hal yang menghambat laju perdagangan dunia nanti pada akhirnya akan hilang. Keadaan inilah yang mendorong banyak negara di dunia, termasuk Indonesia untuk mempersiapkan sumber daya yang dimiliki agar mampu meraih pangsa pasar yang tersedia. Persaingan perdagangan yang sehat diantara banyak negara di dunia dengan lembaga internasional (GATT/WTO) sebagai wasitnya diharapkan seimbang atau proporsional melalui implementasi rekomendasinya. Dalam penelitian ini akan dipaparkan secara deskriptif mengenai dampak implementasi rekomendasi GATT/WTO terhadap perdagangan internasional Indonesia melalui perubahan struktur eksportnya. Melalui fakta-fakta yang terdapat pada data-data di lapangan diharapkan dapat mengetahui dampak tersebut baik secara eksplisit maupun implisit. Data yang digunakan merupakan data *time series* antara tahun 1980 – 2000.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terdapat tiga hal yang menarik untuk diperdebatkan berkaitan dengan dampak implementasi rekomendasi GATT/WTO terhadap perubahan struktur ekspor Indonesia yakni penurunan hambatan tarif dan nontarif, penyempurnaan beberapa implementasi rekomendasi GATT/WTO, serta isu baru tentang perdagangan yang berkaitan dengan tolok ukur investasi (TRIMs) dan tolok ukur hak milik intelektual (TRIPs). Melalui interpretasi penulis dapat diketahui bahwa penurunan hambatan perdagangan internasional yang diberlakukan pada banyak negara termasuk Indonesia masih mempunyai berbagai kelemahan dan mengandung tindakan diskriminatif sehingga Indonesia kurang diuntungkan dengan kondisi tersebut. Hal ini kurang sesuai dengan teori mengenai keuntungan dari perdagangan yang menyebutkan bahwa suatu negara dapat memperoleh keuntungan yang lebih optimal dengan perluasan pasar melalui penurunan hambatan perdagangan internasional.